Memutus dengan Hati Nurani

Suara Karya Online, Selasa, 2 Maret 2010

Oleh: Nur Syam

Tentang Indonesia sebagai negara demokratis, saya rasa tidak ada yang menyangkal. Perjalanan demokrasi seirama dengan tuntutan masyarakat dunia yang menghendaki agar tidak ada lagi negara otoriter. Tuntutan tersebut tentu saja relevan dengan keinginan masyarakat Indonesia yang juga menghendaki keterbukaan dan kebebasan.

Kebebasan dan keterbukaan adalah dua kata yang sangat menarik. Lewat dua kata ini, maka negara-negara yang selama ini masih menerapkan prinsip otoriterisme akhirnya harus menyatakan "kalah". Orde Baru juga diakhiri dengan gerakan kebebasan dan keterbukaan yang menghasilkan reformasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari reformasi, maka kita semua tahu bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban sosial menjadi kata kunci dalam upaya menjadikan Indonesia lebih baik pada masa sekarang dan yang akan datang.

Akhir-akhir ini, kita sedang disibukkan oleh perkara pelik bagi bangsa ini, yaitu bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Itu memang sebuah angka yang tidak kecil. Kasus inilah yang membuat pusing semua orang yang peduli terhadap masa depan Indonesia.

Di dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban tersebut, maka DPR telah melakukan kerja besar melalui penggunaan hak angket Bank Century. Kerja Pansus Century akan segera berakhir, akan segera ada keputusan yang coraknya politis. Hal itu tentu disebabkan oleh kenyataan bahwa pelaksana hak angket adalah anggota DPR yang memang lembaga politis.

Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPR, dikenal ada dua hal yang mendasar, yaitu melalui musyawarah mufakat atau melalui voting. Jika yang diambil adalah melalui musyawarah mufakat, semua anggota DPR yang datang akan menyatakan kesepakatan terhadap suatu hal yang diputuskan. Akan tetapi, jika musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, pastilah voting, one man one vote.

Sejak awal Pansus Angket Bank Century dibentuk, dugaan politisasi kasus ini sudah mencuat. Tuduhan ini tentu wajar sebab memang yang mengusung hak angket adalah lembaga politis. Makanya, banyak orang yang meragukan "kesaktian" Pansus Angket Century ini.

Namun, di dalam Islam terdapat sebuah konsep yang bisa menjadi pattern for behavior. Islam mengajarkan kepada kita semua agar kita berkata jujur walaupun pahit sekalipun. Qul al haqqa walaw kana murran. Artinya, "Katakanlah yang benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun itu pahit". Di sinilah hati nurani menjadi penting. Semua tentu tahu bahwa hati nurani tidak akan membohongi apa yang benar dan apa yang salah.

Oleh karena itu, meski pahit rasanya, anggota DPR harus memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Keputusan ini perlu diambil sebab kita semua memiliki tanggung jawab terhadap diri kita, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kita semua berharap, semoga perjalanan bangsa ini ke depan akan lebih baik, melalui penerapan integritas atau kejujuran, di mana transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Wallahu alam bi al shawab.

(Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel, Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id